

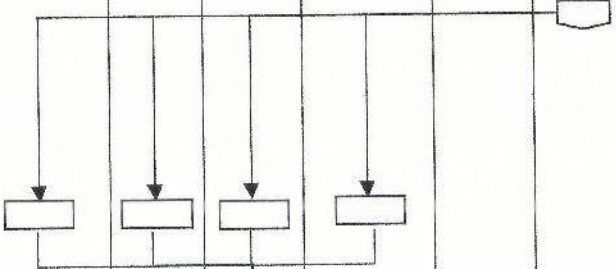
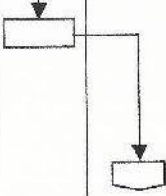
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SEKRETARIAT PROVINSI PAPUA BARAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 2. Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. 3. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Keterkaitan : Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan pembentukan peraturan daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak transparanan, ketidak sinkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembentukan daerah.	Kualifikasi Pelaksana: a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi Raperda; d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu. Peralatan/Perlengkapan: a. Perangkat komputer khusus untuk processing draft dan naskah final Peraturan Daerah; b. Filing cabinet untuk menyampaikan arsip/dokumen penetapan Peraturan Daerah; Pencatatan dan Pendaftaran: a. Dokumentasi penetapan Peraturan Daerah; b. Dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi penegakan Peraturan Daerah.
---	--

No	Kegiatan	PELAKSANA											BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Pengaturan	Kabag Pert. Per-UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membi dangi	Kanwil-kumham PB	DPRPB	SEKDA	Gubernur	Kemen-dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penerimaan berkas permohonan harmonisasi												berkas permohonan lengkap	1 (satu) hari	penyerahan bukti peneri-maan berkas	
2	Pencatatan dalam agenda surat masuk, disampaikan kepada Kepala Biro Hukum												berkas permohonan lengkap	1 (satu) hari	catatan berkas permohonan harmonisasi perda	
3	Disposisi/arahan kepada Kabag Perundang- undangan untuk ditindaklanjuti.												berkas permohonan selengkapny	1 (satu) hari	disposisi/arahan tindak lanjut permohonan harmonisasi	
4	Kabag. Per-UU-an mempelajari materi permasalahan dan memberikan arahan harmonisasi kepada Kepala Sub PPH Pengaturan.												berkas permohonan, arahan kepala biro hukum	2 (dua) hari	arahan kepala bagian perundang- undangan	
5	Kepala Sub PPH Pengaturan menyiapkan materi harmonisasi yang dan melaporkan ke kepala bagian perundang- undangan Provinsi												raperda, naskah akademik dan surat permohonan harmonisasi	1 (satu) hari	berkas harmonisasi raperda	
6	ke kepala bagian perundang-undangan Provinsi Koordinasi Pelaksanaan harmonisasi ranperda dengan Kanwilcumham												hasil koordinasi	1 (satu) hari	jadwal harmonisasi	

No	Kegiatan	PELAKSANA											BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Pengaturan	Kabag Pert. Per-UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membidangi	Kanwil-kumham PB	DPRPB	SEKDA	Gubernur	Kemen-dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Kanwilcumham melaksanakan harmonisasi ranperda dan diserahkan kepada kepada karo hukum												rapenda, naskah akademik dan surat permohonan harmonisasi	3 (tiga) hari	surat pengantar dan berita acara hasil harmonisasi	
8	Kepala biro hukum menugaskan kabag perundang-undangan untuk menyempurnakan hasil harmonisasi ranperda dan disiapkan surat pengantar Gubernur untuk diteruskan kepada DPRPB.												masukan perbaikan draft rancangan perda dan arahan pimpinan	1 (satu) hari	draft rancangan perda yang siap untuk diajukan kepada DPRPB	
9	kabag perundang-undangan melaporkan hasil harmonisasi kepada karo hukum untuk mendapatkan persetujuan												surat permohonan persetujuan	1 (satu) hari	hasil penyempurnaan rapenda	

No	Kegiatan	PELAKSANA											BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Pengaturan	Kabag Pert. Per-UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membi dangi	Kanwil-kumham PB	DPRPB	SEKDA	Gubernur	Kemen-dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Kepala Biro Hukum menandatangani nota pengantar dan parafkoordinasi surat Gubernur pengantar Raperda kepada DPRPB bersama-sama Asisten dan Sekda												draft rancangan perda yang siap diajukan kepada DPRD	1 (satu) hari	net surat pengantar rancangan perda kepada DPRPB	
11	Gubernur menandatangani surat pengantar rancangan perda kepada DPRPB yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum, Asisten Sekda dan Sekda												draft rancangan perda dan surat pengantar kepada DPRPB	1 (satu) hari	surat pengantar rancangan perda siap dikirim	
12	Rancangan Perda disampaikan kepada DPRPB untuk dijadwalkan dan dibahas DPRPB												surat pengantar dan draft rancangan perda	1 (satu) hari	penyempurnaan draft rancangan bahasan pemda dan DPRPB	
13	Perbaikan rancangan perda hasil pembahasan bersama dengan DPRPB												draft hasil bahasan pemda dan DPRPB	3 (tiga) hari	raperda siap ditetapkan oleh Gubernur	

No	Kegiatan	PELAKSANA											BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Penga- turan	Kabag Pert. Per- UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membi- dangi	Kanwil- kumham PB	DPRPB	SEKDA	Gubernur	Kemen- dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Penyampaian ranperda kepada kemendagri untuk fasilitasi												surat fasilitasi, ranperda, propemperkada, ranperda hasil harmonisasi, matriks telaah, berita acara tk.i	1 (satu) hari	hasil fasilitasi	
15	Penyampaian Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang kepada Mendagri untuk evaluasi												raperda tentang pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang	1 (satu) hari	surat pengantar evaluasi raperda	
16	Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang kepada Mendagri untuk evaluasi												surat pengantar dan 3 raperda tertentu	14 (empat belas) hari	dokumen hasil evaluasi raperda tertentu	
17	Hasil Fasilitasi dan Evaluasi raperda disampaikan dari kemendagri ke biro hukum untuk penyempurnaan												surat hasil fasilitasi, keputusan menteri tentang hasil evaluasi dan matriks telaah	3 (tiga) hari	dokumen hasil fasilitasi/hasil evaluasi	

No	Kegiatan	PELAKSANA											BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Penga- turan	Kabag Pert. Per- UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membali- dangi	Kanwil- kumham PB	DPRPB	SEKDA	Gubernur	Kemen- dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Hasil penyempurnaan ranperda disampaikan kepada DPRPB untuk ditetapkan dalam rapat paripurna & dikembalikan												surat hasil fasilitasi, keputusan menteri tentang hasil evaluasi dan matriks telaah		dokumen ranperda final	
19	Permohonan pemberian noreg dari biro hukum ke biro hukum kemendagri												surat permohonan noreg, BA TK. II hasil fasilitasi/evaluasi ranperda	3 (tiga) hari	dokumen permohonan noreg	
20	Biro hukum menerima noreg dari kemendagri												surat pemberian noreg	1 (satu) hari	perda	
18	Finalisasi naskah peraturan daerah dan meneruskan hasil.												rancangan perda dari dprpb	1 (satu) hari	raperda siap ditanda tangani	
19	Penandatanganan Peraturan Daerah oleh Gubernur												rancangan peraturan daerah	1 (satu) hari	peraturan daerah	
20	Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah												peraturan daerah	1 (satu) hari	pengundangan perda pada lembaran daerah	
21	Pemberian Nomor Para-turan Daerah dan Nomor Lembaran Daerah.												perda	1 (satu) hari	perda	

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

SEKRETARIAT PROVINSI PAPUA BARAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2. Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. 3. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.	Kualifikasi Pelaksana: a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi Rapergub; d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan : 	Peralatan/Perlengkapan: a. Perangkat komputer khusus untuk processing draft dan naskah final Peraturan Gubernur; b. Filing cabinet untuk menyampaikan arsip/dokumen penetapan Peraturan Gubernur;
Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan pembentukan peraturan daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidak sinkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembentukan daerah.	Pencatatan dan Pendaftaran: a. Dokumentasi penetapan Peraturan Gubernur; b. Dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi penegakan Peraturan Gubernur.

No	Kegiatan	PELAKSANA									BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Pengaturan	Kabag Pert. Per- UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membi dangi	SEKDA	Gubernur	Kemen- dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penerimaan berkas permohonan harmonisasi										berkas permohonan lengkap	1 (satu) hari	penyerahan bukti penerimaan berkas	
2	Pencatatan dalam agenda surat masuk, disampaikan kepada Kepala Biro Hukum										berkas permohonan lengkap	1 (satu) hari	catatan berkas permohonan harmonisasi perda	
3	disposisi/arahan kepada Kabag Perundang- undangan untuk ditindak lanjuti.										berkas permohonan selengkapny	1 (satu) hari	disposisi/arahan tindak lanjut permohonan harmonisasi	
4	Kabag. Perundang- undangan mempelajari materi permasalahan dan mem- berikan arahan harmonisasi kepada Kepala Sub PPH Pengaturan.										berkas permohonan, arahan kepala biro hukum	2 (dua) hari	arahan kepala bagian perundang- undangan	
5	Kepala Sub PPH Pengaturan menyiapkan materi harmonisasi yang dan melaporkan ke kepala bagian perundang- undangan Provinsi										ranpergub dan surat permohonan harmonisasi	3 (tiga) hari	berkas harmonisasi ranpergub	
6	ke kepala bagian perundang-undangan Provinsi Koordinasi Pelaksanaan harmonisasi bersama pemrakarsa dan perdangkat daerah terkait										hasil koordinasi	1 (satu) hari	jadwal harmonisasi	

No	Kegiatan	PELAKSANA									BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Penga- turan	Kabag Pert. Per- UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membali- dangi	SEKDA	Gubernur	Kemen- dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	kepala bagian perundang-undangan Provinsi bersama perangkat daerah terkait dan pemeriksa melaksanakan harmonisasi ranpergub dan diserahkan kepada karo hukum										rapergub dan surat permohonan harmonisasi	1 (satu) hari	surat pengantar dan berita acara hasil harmonisasi	
8	Kepala biro hukum menugaskan kabag perundang-undangan untuk menyempurnakan hasil harmonisasi ranpergub dan disiapkan surat fasilitasi, paraf koordinasi dan draf matriks rapergub dan dilakukan permohonan fasilitasi melalui aplikasi ePerda ke kemendagri										surat permohonan fasilitasi, sk propemperkada, rancangan pergub, dokumen hasil harmonisasi	1 (satu) hari	dokumen fasilitasi	
9	Penyampaian hasil fasilitasi dari kemendagri kepada Gubernur untuk penetapan, melalui Biro Hukum										surat hasil fasilitasi dan ranpergub hasil fasilitasi	1 (satu) hari	rapergub yang siap untuk ditetapkan	

No	Kegiatan	PELAKSANA									BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Penga- turan	Kabag Pert. Per- UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membi- dangi	SEKDA	Gubernur	Kemen- dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	penyempurnaan naskah ranpergub peraturan gubernur hasil fasilitasi dan meneruskan hasil.										surat hasil fasilitasi dan ranpergub hasil fasilitasi	1 (satu) hari	pergub siap ditanda tangani	
11	Penandatanganan Peraturan Gubernur oleh Gubernur										peraturan gubernur	1 (satu) hari	peraturan gubernur	
12	Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah										peraturan gubernur	1 (satu) hari	pengundangan pergub pada berita daerah	
13	Pemberian Nomor Peraturan Gubernur dan Nomor Berita Daerah.										peraturan gubernur	1 (satu) hari	petikan dan salinan peraturan gubernur	

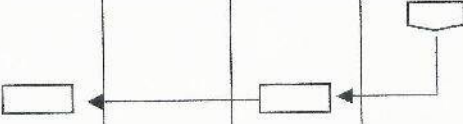
C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI PERDA/PARBUP DAN EVALUASI RANPERDA KABUPATEN

SEKRETARIAT PROVINSI PAPUA BARAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI PERDA/PARBUP DAN EVALUASI RANPERDA KABUPATEN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2. Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. 3. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.	Kualifikasi Pelaksana: a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi Raperda; d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan: a. Perangkat komputer khusus untuk processing draft dan naskah final Peraturan Daerah; b. Filing cabinet untuk menyampaikan arsip/dokumen penetapan Peraturan Daerah;
Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan pembentukan peraturan daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak transparanan, ketidak sinkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembentukan daerah.	Pencatatan dan Pendaftaran: a. Dokumentasi penetapan Peraturan Daerah; b. Dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi penegakan Peraturan Daerah.

No	Kegiatan	PELAKSANA									BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU / Pic Eperda	Kasubbag Wilayah I, II, III	Kabag Pert. Per- UU-an Kab	Karo Hukum	Kabag Hukum Kab	Asisten yang membi- dangi	SEKDA	Gubernur	Kemen- dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penerimaan berkas permohonan fasilitasi/evaluasi										berkas permohonan lengkap	1 (satu) hari	penyerahan bukti penerimaan berkas	
2	Pencatatan dalam agenda surat masuk, disampaikan kepada Kepala Biro Hukum										berkas permohonan lengkap	1 (satu) hari	catatan berkas permohonan harmonisasi perda	
3	Kepala Biro Hukum mendisposisikan kepada Kabag Perundang-undangan Kab untuk ditindak lanjuti.										berkas permohonan selengkapya	1 (satu) hari	disposisi/arahan tindak lanjut permohonan harmonisasi	
4	Kabag. Perundang-undangan Kab. mempelajari Raperda/Raperbub dan memberikan arahan Fasilitasi dan Evaluasi kepada Kasubag Wilayah I, II, III.										berkas permohonan, arahan kepala biro hukum	2 (dua) hari	arahan kepala bagian perundang-undangan	
5	Kepala Sub Wilayah I, II, III menyiapkan materi Fasilitasi dan Evaluasi Raperda, Raperbub yang akan dibahas dan melaporkan ke kepala bagian perundang-undangan Kab.										ranpergub dan surat permohonan harmonisasi	2 (dua) hari	berkas harmonisasi ranpergub	

No	Kegiatan	PELAKSANA									BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU / Pic Eperda	Kasubbag Wilayah I, II, III	Kabag Pert. Per- UU-an Kab	Karo Hukum	Kabag Hukum Kab	Asisten yang membi- dangi	SEKDA	Gubernur	Kemen- dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Kepala bagian perundang-undangan kab Koordinasi Pelaksanaan Faslitasi bersama Kabag Hukum Kab. pemrakarsa dan perdangkat daerah terkait Kab.										hasil koordinasi	1 (satu) hari	jadwal fasilitasi	
7	Kepala bagian perundang-undangan Kab bersama perangkat daerah terkait dan permerkarsa Kab. melaksanakan Fasilitasi/ Evaluasi Raperda, ranperbub dan diserahkan Kepada Karo Hukum										raperdagub dan surat permohonan fasilitasi	14 (empat belas hari	surat pengantar dan berita acara hasil fasilitasi	
8	Kepala Biro Hukum menugaskan kabag perundang-undangan Kab. untuk menyempurnakan hasil Fasilitasi ranperda/ Raperbub dan disiapkan surat Hasil fasilitasi/Evaluasi diparaf, koordinasi dan yang selanjutnya ditetapkan dgn SK Gubernur.										masukan perbaikan draft rancangan perbup dan arahan pimpinan	1 (satu) hari	draft rancangan perbup yang siap untuk diajukan fasilitasi	

No	Kegiatan	Subbag TU / Pic Eperda	PELAKSANA								BUKU MUTU			KET.
			Kasubbag Wilayah I, II, III	Kabag Pert. Per- UU-an Kab	Karo Hukum	Kabag Hukum Kab	Asisten yang membi- dangi	SEKDA	Gubernur	Kemen- dagri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Penyampaian Hasil fasilitasi Raperda, Perbup dan Evaluasi Raperda Kepada Bupati										rancangan perbup yang siap ditetapkan oleh Bupati	1 (satu) hari	raperbup diterima oleh pemda dan siap untuk ditetapkan	

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

SEKRETARIAT PROVINSI PAPUA BARAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 2. Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. 3. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.	Kualifikasi Pelaksana: a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi rancangan Keputusan Gubernur; d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan : 	Peralatan / Perlengkapan: a. Perangkat komputer khusus untuk processing draft dan naskah final Keputusan Gubernur; b. Filing cabinet untuk menyampaikan arsip/dokumen penetapan Keputusan Gubernur;
Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan pembentukan peraturan daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak transparanan, ketidak sinkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembentukan daerah.	Pencatatan dan Pendaftaran: a. Dokumentasi penetapan Keputusan Gubernur; b. Dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi penegakan Keputusan Gubernur.

No	Kegiatan	PELAKSANA								BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Penetapan	Kabag Pert. Per-UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membi dangi	SEKDA	Gubernur	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1	Penerimaan berkas permohonan penyusunan draft SK Gubernur									berkas permohonan lengkap	1 (satu) hari	penyerahan bukti penerimaan berkas	
2	Pencatatan dalam agenda surat masuk, disampaikan kepada Kepala Biro Hukum									berkas permohonan lengkap	1 (satu) hari	catatan berkas permohonan harmonisasi perda	
3	Kepala Biro Hukum mendisposisikan kepada Kabag Perundang-undangan Provinsi untuk ditindak lanjuti.									berkas permohonan selengkapnya	1 (satu) hari	disposisi/arahan tindak lanjut permohonan harmonisasi	
4	Kabag Perundang-undangan Provinsi menugaskan Kasubag PPH Penetapan untuk mempelajari dan menyiapkan Keputusan Gubernur									berkas permohonan, arahan kepala biro hukum	2 (dua) hari	arahan kepala bagian perundang-undangan	
5	Kasubag PPH Penetapan menyampaikan Keputusan Gubernur untuk diparaf koordinasi secara berjenjang dimulai Kabag PerUUan Provinsi, Karo Hukum, Asisten I, dan Sekda									surat keputusan	2 (dua) hari	surat keputusan yang telah diparaf koordinasi	

No	Kegiatan	PELAKSANA								BUKU MUTU			KET.
		Subbag TU Biro Hukum	Kasubbag PPH Penetapan	Kabag Pert. Per-UU-an Prov	Karo Hukum	Perangkat Daerah	Asisten yang membi- dangi	SEKDA	Gubernur	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
6	Kasubag PPH Penetapan menyampaikan Nota Pengantar Penandatanganan SK kepada Gubernur dan ditetapkan									petikan surat keputusan	2 (dua) hari	petikan surat keputusan yang telah di tandatangani	
7	Kasubag PPH Penetapan menyiapkan Salinan Keputusan Gubernur untuk ditandatangani Karo hukum dan disampaikan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa/pemohon.									salinan surat kepupusan	1 (satu) hari	surat keputusan yang telah ditandatangani	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Rt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. Hutabarat, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

1. JUDUL
2. KATA PENGANTAR
3. DAFTAR ISI
4. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

5. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian Teoritis

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

6. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

7. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

8. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH KHUSUS, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

9. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

10. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

11. LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025. TANGGAL DESEMBER 2024

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	JENIS PERATURAN	INSIATIF	STATUS	KET.
1.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.	DPRPB	Usulan Baru (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
2.	Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi Pengusaha Orang Asli Papua.	DPRPB	Usulan Baru (Prioritas)	Naskah Akademik
3.	Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal	DPRPB – Fraksi Golkar	Usulan Baru (Prioritas)	Naskah Akademik
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT Papua Doberai Mandiri	Pemerintah Daerah: Biro Perekonomian	Usulan Baru/ Revisi (Prioritas)	Keterangan/ Penjelasan
5.	Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	Usulan Baru Prioritas	NA/Keterangan Penjelasan
6.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi.	Pemerintah Daerah: Dinas Kebudayaan Pariwisata	Usulan Baru/revisi (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
7.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kawasan Tanpa Rokok Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Dinas Kesehatan	Usulan Baru Prioritas	NA/Keterangan Penjelasan

8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Usulan Baru Prioritas	NA/Keterangan Penjelasan
9.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah	Pemerintah Daerah: Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Usulan Baru (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
10.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Usulan Baru (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
10	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pemerintah Daerah (BPPKAD)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024 (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
11.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Peta Jalan Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (BRIDA)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024 (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
12.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Protokol Investasi di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (BRIDA)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024 (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
13	Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Peradilan Adat.	DPRPB	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024) (Prioritas)	Naskah Akademik
14.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Pemerintah Daerah: Dinas Kesehatan	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
15.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penertiban Kendaraan Plat Luar Daerah di Provinsi Papua Barat	Pemerintah Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
16.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penertiban Aktivitas sosial ekonomi pada ruas jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.	Pemerintah Daerah: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan

17.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tenaga Kerja Konstruksi Tidak Bersertifikat Keahlian di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
18.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penataan Dan Penerbitan Aktifitas Sosial Ekonomi Pada Ruas Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
19.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pramuwisata	Pemerintah Daerah: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
20.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Sektor Pariwisata di Provinsi Papua Barat	Pemerintah Daerah: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
21.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Disabilitas.	Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
22.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Upaya Khusus Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nelayan dan Peternak di Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Dinas Tanaman Pangan Hultikultura Dan Pertanian)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
23.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan Dan Perikanan)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
24.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Informasi Publik Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (DISKOMINFO)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
25.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (DISKOMINFO)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
26.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
27.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Ketiga Atas Perdasi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan

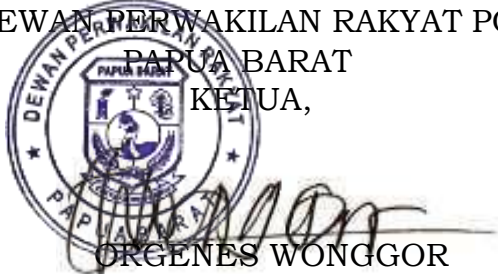
	Daerah Provinsi Papua Barat.			
28.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Sistem Tambatan Kapal Wisata di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (BRIDA)	Usulan Baru	NA/Keterangan Penjelasan
29.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penataan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (BRIDA)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
30.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Mineral dan Batu Bara di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
31.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
32.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
33.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang SOP Hibah/Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
34.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
35.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dan Perhitungannya Serta Pertanggungjawaban dan Pengawasannya.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
36.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kewenangan Provinsi Papua Mencakup Kewenangan Dalam Seluruh Bidang Pemerintahan dan Kewenangan Khusus	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan

37.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Lambang Daerah	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
38.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
39.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Bidang Sosial	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
40.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
41.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
42.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembangunan Kependudukan.	Pemerintah Daerah (Biro Adiminstrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA PERDA	BIDANG KERJA	INSIATIF	STATUS	KET.
1	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024	BPPKAD	Pemerintah Daerah	Baru	Prioritas
2	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Perubahan APBD Tahun 2025	BPPKAD	Pemerintah Daerah	Baru	Prioritas -
3	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	BPPKAD	Pemerintah Daerah	Baru	- Prioritas
4	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Rencana Pembangunan Jangka	BAPPEDA	Pemerintah Daerah	Baru	Prioritas

	Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025- 2030				
--	--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT POVINSI
PAPUA BARAT
KETUA,


ORGENES WONGGOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 171 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025

Rancangan Peraturan Gubernur Pada Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
1	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
2	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan lampirannya.	GUBERNUR PAPUA BARAT	
3	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
4	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.	GUBERNUR PAPUA BARAT	
5	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.	GUBERNUR PAPUA BARAT	
6	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
7	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Arsitektur Spbe Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
8	DINAS PERHUBUNGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rkpd-P Ta 2025	GUBERNUR PAPUA BARAT	
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rkpd Tahun 2026	GUBERNUR PAPUA BARAT	
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rkpd-P Tahun 2026	GUBERNUR PAPUA BARAT	
12	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Naskah Dinas Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Jadwal Retensi Arsip(Jra)	GUBERNUR PAPUA BARAT	
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)	GUBERNUR PAPUA BARAT	
15	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun 2025	GUBERNUR PAPUA BARAT	
16	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun 2025	GUBERNUR PAPUA BARAT	
17	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024	GUBERNUR PAPUA BARAT	
18	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana	GUBERNUR PAPUA BARAT	
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana-Fakfak	GUBERNUR PAPUA BARAT	
21	UPT BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
22	BPSDM	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
23	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Mekanisme Penetapan Nilai Paket Pekerjaan, Persyaratan Administrasi Dan Akses Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Kontraktor Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Bara	GUBERNUR PAPUA BARAT	
24	DINAS KEHUTANAN	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Papua Barat Tahun 2024-2026	GUBERNUR PAPUA BARAT	
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2021 Dari Tenaga Honorer Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
26	DINAS KESEHATAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Imunisasi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
27	DINAS KESEHATAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Hiv/Iida Dan Ims Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
28	DINAS KESEHATAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Afirmasi Otonomi Khusus Di Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
29	DINAS KESEHATAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemetaan Layanan Rujukan Kesehatan Di Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
30	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Ekonomi Kreatif Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rancanga Peraturan Gubernur Tentang Kewenangan Pemetaan/Survei Potensi Mineral Logam,Non Logam, Dan Batura Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
33	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pengembangan Energi Hijau Di Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
34	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Dokumen Cetak Biru (Blue Print) Pertambangan Mineral Logam Dan Batubara	GUBERNUR PAPUA BARAT	
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Dari Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat Formasi Tahun 2021	GUBERNUR PAPUA BARAT	
36	DINAS KOPERASI DAN UKM	Rancanga Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih	GUBERNUR PAPUA BARAT	
37	INSPEKTORAT	Rancanga Peraturan Gubernur Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Inpektorat Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
38	BAPENDA	Rancanga Peraturan Gubernur Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
39	BAPENDA	Rancanga Peraturan Gubernur Tentang Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah (Simeriah) Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
40	BIRO ORGANISASI	Rancanga Peraturan Gubernur Tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah	GUBERNUR PAPUA BARAT	
41	BIRO ORGANISASI	Rancanga Peraturan Gubernur Tentang Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
42	BPSDM	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Sistem Satu Pintu Pada Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
43	DINAS KESEHATAN	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pelayanan Kesehatan Gratiss Dan Terintegrasi Untuk Masyarakat Orang Asli Papua	GUBERNUR PAPUA BARAT	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 152
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 127 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024

Rancangan Peraturan Gubernur Pada Program Perencanaan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
1	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
2	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan lampirannya.	GUBERNUR PAPUA BARAT	
3	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
4	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.	GUBERNUR PAPUA BARAT	
5	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.	GUBERNUR PAPUA BARAT	
6	INSPEKTORAT DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
7	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Arsitektur Spbe Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
8	BIRO OTSUS	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sotk Biro Otsus Dan Rip Bidang	GUBERNUR PAPUA BARAT	
9	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
10	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Kode Etik Di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penanaman Modal Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Provinsi	GUBERNUR PAPUA BARAT	
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomo 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Puntu	GUBERNUR PAPUA BARAT	
14	DINAS PERIUBUNGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	GUBERNUR PAPUA BARAT	
15	DINAS PERHUBUNGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
16	DINAS PERHUBUNGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Bagi Kapal Penumpang Dan Barang Pada Kapal Pelayaran Tetap	GUBERNUR PAPUA BARAT	
17	DINAS PERHUBUNGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jasa Bongkar Muat Barang/Kontainer Dan Penumpukan Kontainer Di Pelabuhan Yang Diusahakan	GUBERNUR PAPUA BARAT	
18	DINAS PERHUBUNGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jasa Pelabuhan Bagi Barang Yang Di Angkut Oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan-Pelabuhan Serta Kendaraan Roda Empat Di Pelabuhan Penyembrangan Dan Pelabuhan Yang Diusahakan	GUBERNUR PAPUA BARAT	
19	DINAS PENDIDIKAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan	GUBERNUR PAPUA BARAT	
20	DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Dan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kcpemudaan Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2026	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan manusia Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor	GUBERNUR PAPUA BARAT	
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Di Wilayah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah Di Wilayah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	GUBERNUR PAPUA BARAT	
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Pengawasan Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Penguatan Peternak Orang Asli Papua (OAP) Khususnya Pada Peternakan Komoditas Ternak Unggas di Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, Benih, Bibit, Ternak Potong, Obat Hewan Dan Pakan Ternak Serta Makanan Suplemen Dan Adiktif Di Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Barat Tahun 2025	GUBERNUR PAPUA BARAT	
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Barat Tahun 2024	GUBERNUR PAPUA BARAT	
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Alat Berat Dan Alat Besar Pada Dinas PUPR Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
33	BIRO PEREKONOMIAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah	GUBERNUR PAPUA BARAT	
34	BALITBANGDA	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Tambatan Kapal Wisata Di Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
35	BALITBANGDA	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Perijinan Pengelolaan Mangrove (Turunan Perda Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove)	GUBERNUR PAPUA BARAT	
36	BALITBANGDA	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Tata Kerja Dan Organisasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah	GUBERNUR PAPUA BARAT	
37	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
38	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Subtansif Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
39	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif	GUBERNUR PAPUA BARAT	
40	KESBANGPOL	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Data Suku Dan Sub Suku Di Wilayah Adat Bomberai Dan Doberai Di Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
41	KESBANGPOL	Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotik Dan Perkusor Narkotik	GUBERNUR PAPUA BARAT	
42	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun 2024	GUBERNUR PAPUA BARAT	
43	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	GUBERNUR PAPUA BARAT	
44	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah	GUBERNUR PAPUA BARAT	
45	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	GUBERNUR PAPUA BARAT	
46	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun 2025	GUBERNUR PAPUA BARAT	
47	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023	GUBERNUR PAPUA BARAT	
48	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran	GUBERNUR PAPUA BARAT	
49	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024	GUBERNUR PAPUA BARAT	
50	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Perjalanan Dinas	GUBERNUR PAPUA BARAT	
51	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang SSH	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
52	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang HSPK	GUBERNUR PAPUA BARAT	
53	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang SBU	GUBERNUR PAPUA BARAT	
54	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja	GUBERNUR PAPUA BARAT	
55	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tak Terduga	GUBERNUR PAPUA BARAT	
56	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
57	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Stunting Melalui Pendewasaan Usia Perkawinan	GUBERNUR PAPUA BARAT	
58	DINAS ESDM	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Mineral Di Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
59	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelatihan Kerja	GUBERNUR PAPUA BARAT	
60	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perekrutan Dan Seleksi Tenaga Kerja	GUBERNUR PAPUA BARAT	
61	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Tenaga Kerja Orang Asli Papua Oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	GUBERNUR PAPUA BARAT	
62	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Pengujian Serta Untuk Memperoleh Ijin Keterangan K3	GUBERNUR PAPUA BARAT	
63	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Struktur Dan Besarnya Penjualan Produksi Usaha Daerah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
64	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Perikanan	GUBERNUR PAPUA BARAT	
65	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana	GUBERNUR PAPUA BARAT	
66	UPT BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat	GUBERNUR PAPUA BARAT	

NO	OPD PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPEMPERKADA)	KEWENANGAN	KETERANGAN
68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Pt. Papua Doberai Mandiri Untuk Melaksanakan Pengelolaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.	GUBERNUR PAPUA BARAT	
69	BIRO ORGANISASI	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas	GUBERNUR PAPUA BARAT	
70	BPSDM	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
71	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.	GUBERNUR PAPUA BARAT	
72	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
73	BPKAD	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah	GUBERNUR PAPUA BARAT	
74	BIRO OTSUS	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Dan Evaluasi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
75	BIRO PEMERINTAHAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	
76	DINAS PERHUBUNGAN	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat	GUBERNUR PAPUA BARAT	

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PL. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorisinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)

NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE